

DESAIN DATABASE PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Nova Rijati¹, Budi Widjajanto², Dewi Agustini Santoso³

¹ Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

² Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

³ Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang

E-mail : novaola@yahoo.com¹, budipojok@yahoo.com², dewintya@yahoo.co.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini menghasilkan model database sebagai pendukung layanan informasi publik Perguruan Tinggi Swasta yang cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikoordinasikan melalui Kopertis Wilayah VI. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan perancangan model pengelolaan database dengan cara menganalisis dan identifikasi sumber data pendukung layanan informasi publik PTS menggunakan tools Context Diagram, menganalisis dan perumusan model pengolahan data untuk menghasilkan informasi publik PTS menggunakan Data Flow Diagram, menganalisis dan identifikasi informasi publik PTS, berdasarkan Context Diagram serta Data Flow Diagram merumuskan model hubungan antar entitas dalam sistem dalam Entity Relationship Diagram, sehingga dihasilkan desain menu database pendukung informasi publik Perguruan Tinggi Swasta yang terintegrasi.

Kata Kunci : model, database, informasi publik

Abstract

The purpose of this research resulted in a database model as a public information service supporting PTS rapid and timely, cost-lightweight, and simple manner in accordance with the mandate of UU 14/2008 on Public Information that is coordinated through Kopertis Region VI. To achieve these objectives is to design a database management model by analyzing and identifying sources of public information services supporting PTS data using tools of Context Diagram, analyzing and formulating data processing models to produce PTS public information using Data Flow Diagrams, analyze and identify PTS public information, based on context Diagram and Data Flow Diagram to formulate a model of relationships between entities in the system in the entity Relationship Diagram, so that the resulting database menu design support integrated public information for PTS.

Keywords: models, databases, public information

1. PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik [1]. Untuk mewujudkan misi

good governance ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [2] dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008 [3], yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan yang berkualitas

Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung dibawah pembinaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI yang berjumlah 246 tentunya tidak luput dari kewajiban untuk menyediakan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2011 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Penyajian informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta dan tersedia setiap saat dapat disajikan dalam bentuk *soft copy*, *hard copy* dan laman resmi Kementrian/Perguruan Tinggi Negeri/Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta/Unit Pelaksana Teknis” [4].

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik berbasis TI telah diimplementasikan pada beberapa negara maju, antara lain Singapura, Rumania dan China. Keberhasilan Pemerintah Singapura telah dianalisis dalam penelitian [5], yang menyatakan bahwa keberhasilan *e-Government* Pemerintah Singapura ditopang oleh empat komponen utama, yakni : (i) isi informasi, (ii) infrastruktur ICT, (iii) infrastruktur *e-government*, dan (iv) promosi *e-government*. Sedangkan pengalaman Pemerintah Rumania, seperti dijelaskan oleh [6] menyatakan bahwa konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis, konsisten, koheren dan mudah diakses sehingga setiap pengguna, meskipun tanpa pengetahuan internet memadai sekalipun, dapat memperoleh informasi serta menggunakan layanan on-line. Selanjutnya strategi pengembangan website pusat layanan publik yang terintegrasi (*one-stop centre*) dijelaskan oleh [7] yang terdiri dari empat tahap pengembangan yakni : katalogisasi,

transaksi, integrasi vertikal ; integrasi horisontal.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa layanan publik berbasis teknologi informasi perlu ditopang dengan : informasi yang berkualitas, terintegrasi serta mudah diakses. Dimana untuk memelihara informasi dan membuat informasi tersebut mudah diakses dibutuhkan suatu sistem yang terkomputerisasi yang disebut sistem database [8].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan pengelolaan database sebagai pendukung layanan informasi publik Perguruan Tinggi Swasta yang cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan, dan cara sederhana sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikoordinasikan melalui Kopertis Wilayah VI [2].

Dengan Pemodelan pengelolaan database sebagai pendukung layanan informasi publik Perguruan Tinggi Swasta ini sangat menguntungkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI yang merupakan Badan Publik dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, karena masing-masing PTS tidak perlu menafsirkan informasi publik dan mengembangkan database informasi publik berdasarkan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendukung sistem layanan informasi publik masing-masing. Keuntungan lain adalah memberikan kemudahan bagi Komisi Informasi untuk melakukan pengawasan pada badan publik untuk menyediakan serta melengkapi informasi publik terutama pada bidang pendidikan. Selain itu

pengimplementasian database informasi publik PTS sebagai pendukung layanan informasi publik bidang pendidikan, menjadikan informasi publik bidang pendidikan menjadi mudah untuk disosialisasikan kepada masyarakat, karena Kopertis Wilayah VI cukup mengumumkan satu alamat website saja sebagai penyedia layanan informasi public dalam bagian ini.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik tak lepas dari penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain atau oleh Bank Dunia disebut sebagai e-government. Di Indonesia pengembangan e-Government berpedoman pada Instruksi Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government [9] serta Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 55 / KEP / M.KOMINFO / 12 / 2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah [10].

Portal-portal (kanal informasi) e-Government yang terbaik merupakan situs pemerintah yang informatif, komprehensif dan efektif, terintegrasi dengan kuat, mampu memuat informasi yang luar biasa besar, menyediakan fitur yang lengkap dan memanfaatkan semua teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dikemukakan oleh [11] dalam penelitiannya yang berjudul Portal-Portal e-Government Terbaik Di Dunia. United Nations E-Government Survey Releases 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 7 dari 11 negara di Asia Tenggara dibawah Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philipina dan Thiland [12].

Keberhasilan Pemerintah Singapura dalam mengimplementasikan telah dianalisis oleh [5] dalam penelitian yang berjudul “E-government implementation: A macro analysis of Singapore's e-government initiatives”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa keberhasilan e-Government Pemerintah Singapura ditopang oleh empat komponen utama, yakni : (i) isi informasi, (ii) infrastruktur ICT, (iii) infrastruktur e-government, dan (iv) promosi e-government.

Pemanfaatan *e-Government* untuk pelayanan informasi publik agian ini berisi kajian literatur yang dijadikan sebagai penunjang konsep penelitian. Kajian literatur tidak terbatas pada teori saja, tetapi juga bukti-bukti empiris. Hipotesis peneltian (jika ada) harus dibangun dari konsep teori dan didukung oleh kajian empiris (penelitian sebelumnya). telah diimplementasikan oleh Pemerintah Romania, seperti diungkapkan oleh [6] dalam penelitiannya yang berjudul “*e-Romania – A Citizens’ Gateway towards Public Information*” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis konsisten, koheren dan mudah diakses

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode action research. Pada tahun kedua ini, berdasarkan pemetaan pada tahun pertama akan dilaksanakan tindakan (action) untuk memodelkan pengelolaan database informasi publik PTS yang kemudian diimplementasikan untuk mendukung layanan informasi publik bidang pendidikan pada Kopertis Wilayah VI yang sesuai dengan UU

14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tahun kedua adalah kegiatan lanjutan tahun pertama dan ditujukan untuk merancang model pengelolaan database pendukung informasi publik PTS yang kemudian diimplementasikan untuk mendukung layanan informasi publik bidang pendidikan pada Kopertis Wilayah VI yang sesuai dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan hasil tersebut maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap kedua ini meliputi Perancangan model pengelolaan database pendukung layanan informasi publik, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Analisis dan identifikasi sumber data pendukung layanan informasi publik PTS, digunakan tools Context Diagram. Dengan demikian akan tergambar dengan jelas jenis-jenis dan sumber data yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi publik serta jenis-jenis serta penerima informasi tersebut.
- b. Analisis dan perumusan model pengolahan data untuk menghasilkan informasi publik PTS. menggunakan data flow diagram atau DFD.
- c. Analisis dan identifikasi informasi publik PTS. Berdasarkan Context Diagram serta Data Flow Diagram selanjutnya dirumuskan model hubungan antar entitas dalam sistem terutama yang terkait dalam menghasilkan informasi publik dalam Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Jenis Informasi Publik Bidang Pendidikan Pada situs Kopertis 6

Informasi publik bidang pendidikan menurut UU 14/2008 yang diatur lebih lanjut dalam Permendiknas No 50 tahun 2011 yang harus disediakan sejumlah 58 jenis, terdapat 17 jenis informasi publik yang tersedia (29 %) pada situs kopertis 6 (www.kopertis6.or.id) sehingga masih terdapat 41 jenis informasi publik (71 %) yang belum tersedia. Selanjutnya informasi publik tersebut dikategorikan menjadi 2 jenis informasi, yakni informasi yang bersifat statis (tidak berubah-ubah dalam jangka waktu paling tidak 6 bulan sekali) dan informasi yang bersifat dinamis (berubah berdasarkan transaksi melalui situs layanan) yang disajikan dalam bentuk text, gambar dan tabel. Peta situs kopertis 6 (www.kopertis6.or.id) berdasarkan jenis informasi publik adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Jenis Informasi Publik

Jenis Informasi Publik	Tersedia	Belum Tersedia
Informasi Statis	16	37
Informasi Dinamis	1	4

3.2 Database informasi public yang bersifat statis.

Untuk informasi public yang bersifat statis, pengguna hanya dapat melihat isi dokumen pada situs. Interaksi terbatas pada melihat informasi yang ditampilkan. Informasi publik jenis statis akan ditampilkan dengan cara dikoding dalam format HTML pada editor teks dan disimpan dalam bentuk .html (misal: informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing-masing PPID, struktur

organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural, dll) atau dengan cara *link* dengan alamat situs tertentu yang menyediakan jenis informasi yang sama (misal : informasi beasiswa, informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di lingkungan kementerian, informasi tentang penerimaan calon peserta didik, dll). Informasi publik bidang pendidikan yang termasuk jenis ini yakni : semua informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (pasal 13) dan informasi yang wajib tersedia setiap saat (pasal 15).

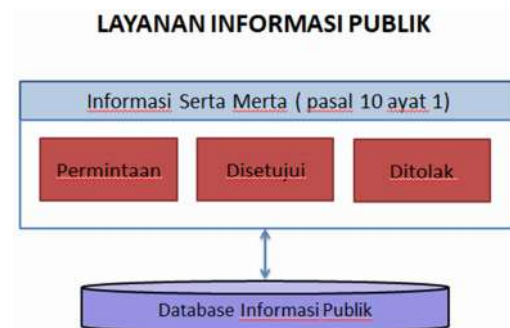
3.3 Desain database informasi publik yang bersifat dinamis.

Dari hasil analisis, terdapat 2 jenis informasi yang bersifat dinamis, yakni : pertama jenis informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta meliputi informasi terkait dalam bidang pendidikan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagai akibat seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, penyebaran penyakit, racun pada bahan makanan, gangguan terhadap utilitas publik diumumkan melalui situs dengan konsep *running text* sehingga akan selalu terbaca oleh pengunjung situs ; kedua jenis informasi publik yang berkaitan dengan akses informasi publik yang terdiri dari : jumlah permohonan informasi publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak serta alasan penolakan permohonan informasi publik, sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, dengan prinsip-prinsip :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut

Dengan demikian, konsep database informasi publik pendukung layanan informasi publik adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Layanan Informasi Publik

Informasi serta merta ditampilkan dengan konsep *running text* yang selalu tampil pada seluruh halaman situs dengan tujuan pengunjung situs selalu dapat mengetahui serta membaca membaca informasi tersebut.

Menu permintaan akses informasi publik disediakan untuk pengunjung yang ingin mendapatkan *softcopy* informasi publik. Syarat untuk permintaan informasi publik ini, pengunjung harus mendaftarkan alamat email terlebih dahulu, karena *softcopy* informasi publik yang permintaannya disetujui maupun alasan penolakan bagi permintaan informasi publik yang tidak dapat dipenuhi akan disampaikan melalui *email*.

Database informasi publik pada dasarnya berisi data-data pengunjung serta transaksi permintaan informasi publik tertentu.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada website kopertis6.or.id terdapat 58 jenis informasi publik yang bersifat statis, berupa text/document, gambar maupun link.
2. Pada website kopertis6.or.id terdapat 2 jenis informasi yang bersifat dinamis, yakni : (1) jenis informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yang meliputi meliputi informasi terkait dalam bidang pendidikan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagai akibat seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, penyebaran penyakit, racun pada bahan makanan, gangguan terhadap utilitas publik diumumkan melalui situs dengan konsep *running text* sehingga akan selalu terbaca oleh pengunjung situs ; dan (2) jenis informasi publik yang berkaitan dengan akses

informasi publik yang terdiri dari : jumlah permohonan informasi publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak serta alasan penolakan permohonan informasi publik, yang berarti akan menjadi satu kesatuan dengan model pelayanan informasi publik melalui situs kopertis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Effendi, Sofian. 2009. *“Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif, Efisien, Efektif”*, Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi, Jakarta.
- [2] ----- . 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta
- [3] ----- . 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta
- [4] ----- . 2011. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No.50 tahun 2011 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan
- [5] Bucharest Chan, Lau, Pan 2008 , *“E-government implementation:*

- A macro analysis of Singapore's e-government initiatives*"
- [6] Banciu, Diona. 2009. "e-Romania-A Citizens' Gateway towards Public Information". National Institute for Research and Development in Informatics – ICI.
- [7] Heng, Wang & Jinchang, Hou. 2010. "An Integrated Approach to Developing a Successful one-stop Portal e-Government". Paper in Computer Science and Information Technology IEEE International Conference, Chengdu
- [8] Date, C.J., 1995, *An Introduction to Database System, Vol 1 7 th Edition, Addison Wesley*
- [9] ----- . 2003. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Jakarta
- [10] ----- . 2003. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia No. 55 tahun 2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Jakarta
- [11] Sutrisno, Ashari & Istiyanto, Jazi Eko. 2009. "Portal-Portal e-Government Terbaik Di Dunia". *Proceeding pada Seminar Nasional Informatika 2009 UPN "Veteran", Yogyakarta*
- [12] United Nations, 2012. "E-Government Survey 2012 : E-Government for the People". <http://www.unpan.org/e-government>. Viewed April, 2 2012